



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Jend.Sudirman No. 6 - 7 Aek Kanopan Kode Pos 21457
Email : disdagkopukm@gmail.com Telp : (0624) 693014

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 800 / / Disdagkop.UKM/2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;

b. bahwa Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/...../DISKOMINFO/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/206/HUMASINFORKOM/2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Labuhanbatu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4896);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

/5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2017;
15. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/ /DISKOMINFO/2017 tentang Perubahan Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor : 480/206/HUMASINFORKOM/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

/KESATU

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) di Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :
- a. Membantu PPID dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik serta dokumentasi;
 - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik;
 - f. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi;
- KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 2018

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SYAHRUL ADNAN HASIBUAN, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19650805 198702 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan (sebagai laporan).
2. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
4. PPID Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran I
Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi
UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara
Nomor : 800/ /Disdagkop.UKM/2018
Tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu di Dinas Perdagangan dan
Koperasi UKM Kab.Labuhanbatu Utara

SUSUNAN KEANGGOTAAN PPID PEMBANTU DI DINAS PERDAGANGAN DAN
KOPERASI UKM KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

No.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN
1.	Pengarah/Atasan PPID :	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2.	PPID :	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.
3.	Sekretariat :	1. Kasubbag Program dan Keuangan 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Operator Bagian Program pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara
4.	Bidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar :	Kabid Perdagangan dan Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.
	Anggota :	1. Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri 2. Kasi Metrologi 3. Kasi Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara
5.	Bidang Koperasi dan UKM :	Kabid Koperasi dan UKM pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara.
	Anggota :	1. Kasi Kelembagaan dan Penyuluhan Koperasi 2. Kasi Permodalan dan Bina Usaha Pertanian dan Non Pertanian 3. Kasi Pembiayaan Simpan Pinjam dan Pengembangan Koperasi pada Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara

KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SYAHRUL ADNAN HASIBUAN, SE
PEMBINA TK.I
NIP. 19650805 198702 1 003

